



KR-Antara/Sigid Kurniawan

Pengambilan sumpah jabatan dalam pelantikan Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Badan, Gubernur Lemhanas, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

## Perlancar Tugas Presiden Lagi, Prabowo Lantik 7 Penasihat Khusus

JAKARTA (KR) - Melengkapi kinerja Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto, Selasa (22/10) melantik tujuh orang sebagai Penasihat Khusus Presiden di Istana Negara Jakarta. Pelantikan tujuh orang itu berdasarkan Keputusan Presiden No 140P Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan seterusnya. Kesatu mengangkat Penasehat Khusus Presiden," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara, Ninik Purwanti saat membacakan Keputusan Presiden tersebut.

Ketujuh Penasihat Khusus Presiden yang dilantik Prabowo itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto SH MM, Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Jenderal TNI

(Purn) Luhut Binsar Pangdajaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Prof Dr Dudung Abudrachman SE MM.

Kemudian, Penasihat Khusus Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi Prof Ir Purnomo Yugiantoro MSc MA, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Nasional Letnan Jenderal TNI (Purn) Prof Dr dr Terawan Agus Putranto

SpRad(K) Sebelumnya Presiden ke-7 Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden No 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Penetapan Perpres itu ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024 saat ia masih menjabat Presiden.

Sebagaimana salinan perpres yang diunduh di laman jdih.setneg.go.id, Perpres itu mengatur tentang keberadaan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Baik Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden.

Presiden Prabowo kemarin juga melantik lima kepala badan khusus dan enam wakil kepala badan.

Kelima kepala badan \* Bersambung hal 7 kol 5

### KESIAPAN LOGISTIK PILKADA 60 PERSEN

## Bima Arya Ditunjuk Bentuk 'Desk Pilkada'

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Wakil Mendagri Bima Arya membentuk Desk Monitoring Pilkada Serentak 2024. Pembentukan desk ini agar pilkada dapat terselenggara dengan baik.

"Untuk jangka pendek saya meminta melanjutkan studi mengetahui apa saja faktor seseorang dapat lolos beasiswa. Dalam proses wawancara misalnya, yang dianggap sebagai penentu kelulusan, penerima merasa proses berjalan lancar dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik namun tetap saja ditolak. Pelamar sudah sangat menunggu momen pembukaan

terian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) hingga TNI/Polri. "Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya termasuk keormasan, toleransi, karena salah satu tugas 'Polpum' (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum) adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebhinekaan, Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa," jelasnya.

Selain itu, mantan Walikota Bogor itu, juga akan menangan *electronic government* atau *e-government* (e-govt) yang memerlukan

infrastruktur IT. Tito juga sudah menyampaikan besaran anggaran untuk program tersebut, sehingga Bima dapat langsung mengeksekusinya.

Meski begitu, Bima perlu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital. "Perlu proaktif untuk memberikan dukungan maksimal kepada sistem yang diinginkan Bapak Presiden," ujar Tito.

\* Bersambung hal 7 kol 1

## Analisis Transparansi Beasiswa

Stara Asrita SIKom MA



BARU-baru ini terjadi kisruh tentang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2024 yang memangkas kuota penerima tanpa ada penjelasan pasti. Para dosen yang sudah berharap dapat melanjutkan studi doktoral merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Harapan mereka terbenam dalam ketidakpastian. Diskusi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kampus (SPK) ada beberapa kesimpulan yang mungkin menjadi alasan penurunan kuota tersebut.

Pertama, proses seleksi yang tidak transparan. Banyak calon penerima beasiswa merasa bahwa proses seleksi tidak adil atau tidak jelas, menyebabkan ketidakpuasan. Calon penerima beasiswa tidak mengetahui apa saja faktor seseorang dapat lolos beasiswa. Dalam proses wawancara misalnya, yang dianggap sebagai penentu kelulusan, penerima merasa proses berjalan lancar dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik namun tetap saja ditolak. Pelamar sudah sangat menunggu momen pembukaan

\* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:26	14:35	17:36	18:46	03:56

Rabu, 23 Oktober 2024 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

## KORUPSI SISTEM PROTEKSI TKI Eks Dirjen Kemenaker Divonis 4 Tahun

JAKARTA (KR) - Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 2011-2015 Reyna Usman divonis pidana penjara selama 4 tahun. Reyna terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenaker pada tahun 2012.

"Menyatakan terdakwa Reyna Usman telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua," kata Hakim Ketua Teguh Santoso dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (22/10).

Dalam kasus tersebut, Reyna didakwa merugikan negara sebesar Rp 17,68 miliar bersama I Nyoman Darmananta dan Karunia, yang juga menjadi terdakwa. Ketiganya diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa korupsi untuk memperkaya Karunia

\* Bersambung hal 7 kol 5

### Pembetulan

Dalam berita, Selasa (22/10) halaman 1 berjudul 'Eko Suwanto: Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada Sehat, Bermartabat dan Berbudaya', seharusnya berjudul 'Eko Suwanto Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada Sehat, Bermartabat dan Berbudaya'. Demikian pembetulan ini, mohon maaf dan maklum adanya. (Red)-d

## SHI APRESIASI PP NOMOR 44 TAHUN 2024 Tunjangan Jabatan Hakim Naik 40 Persen

JAKARTA (KR) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 yang mengatur kenaikan tunjangan jabatan hakim sebesar 40 persen merupakan capaian yang patut diapresiasi. Pasalnya, satu dari empat tuntutan SHI telah direpons oleh pemerintah. Namun begitu, SHI menilai terbitnya PP tersebut belum menyelesaikan semua permasalahan.

"PP Nomor 44 Tahun 2024 baru mencakup kenaikan tunjangan jabatan, sementara sembilan komponen hak keuangan lainnya belum diatur," ungkap Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid dalam konferensi pers daring diikuti dari Jakarta, Selasa (22/10).

Dijelaskan Fauzan, komponen yang belum diatur mencakup gaji pokok, fasilitas perumahan, transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, serta penghasilan pensiun dan tunjangan lainnya. Selain itu, SHI merasa ketimpangan kesejahteraan hakim masih terjadi.



KR-Antara/Fath Putra Mulya  
Fauzan Arrasyid

Pemerintah, sambung dia, perlu memahami secara komprehensif putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2018. Putusan MA itu tidak sekadar mengatur pemisahan norma gaji pokok dan pensiun hakim dari ASN, tetapi juga menuntut penetapan nominal yang lebih tinggi.

Oleh sebab itu, SHI tetap berkomitmen untuk memperjuangkan empat tuntutan utama kepada pemerintah. Yaitu penyelesaian terhadap seluruh hak keuangan

\* Bersambung hal 7 kol 1

## Ruang Lingkup dan Mitra Kerja Komisi DPR, Terbentuk

JAKARTA (KR) - Rapat Paripurna ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menetapkan ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

"Apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10). Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

Puan mengatakan, penetapan ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai Komisi XIII tersebut merupakan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada Senin (21/10). Pimpinan DPR lantas meminta Kesetiaan DPR menyangkan ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I hingga Komisi XIII serta Badan Anggaran DPR RI.

Komisi I DPR RI membidangi pertahanan, luar negeri dan informatika. Dengan mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Panglima TNI/Mabas TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),

\* Bersambung hal 7 kol 1

## DIHARAPKAN DUKUNG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pelabuhan Perikanan Berbasis Pariwisata PPP Gesing Gunungkidul Diresmikan

GUNUNGKIDUL (KR) - Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing Gunungkidul diresmikan oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (22/10). Peresmian dilaksanakan di Dermaga PPP Gesing ditandai penandatanganan prasasti PPP Gesing sekaligus BKK Desa Maritim Kalurahan Girikarto oleh Wagub DIY. Dalam acara tersebut Paku Alam X juga meninjau aktivitas TPI Higienis, Kantor Syahbandar, shelter nelayan serta penanaman pohon di area BKK Desa Maritim.

Pelabuhan perikanan yang dibangun sejak 2016 di atas lahan seluas sekitar 54.000 m2 dengan beberapa tahapan tersebut memiliki keunggulan seperti

terdapatnya break water atau penahan gelombang berupa ujung teluk dan

Teluk Gesing menghadap ke sisi Tenggara Samudera Hindia, sehingga gelombang yang masuk tidak langsung ke pantai.

Gubernur DIY dalam sambutan yang dibacakan Wagub DIY mengatakan, peresmian PPP Gesing

\* Bersambung hal 7 kol 1



KR-Istimewa

Wakil Gubernur DIY Paku Alam X didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan DIY Bayu Mukti Sasongka meninjau aktivitas di PPP Gesing.

**SUNGGUH  
SUNGGUH  
TERJADI**

● KETIKA saya membeli pecel Madiun, si tukang pecel Madiun terbungong-bungong karena tanpa sadar saya pesan SGPC satu porsi. Hal itu terjadi karena saya teringat semasa kuliah di Jogja. Saat itu hampir setiap hari makan sega pecel yang terkenal dengan singkatan SGPC. (Samsudi, Jalan Pintu Air 76 RT 10 RW 12 Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat 11750)-f